

Pendampingan Penataan Ruang Berbasis Kebutuhan Pengguna pada Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X

Andi Prasetyo Wibowo^{1*}, Albert Galen Fabian², Vincentia Reni Vitasurya³

Dosen Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 44, Sleman, Yogyakarta^{1,3}

Mahasiswa Program Studi Sarjana Arsitektur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari No. 44, Sleman, Yogyakarta²

Email*: andi.prasetyo@uajy.ac.id

Received 1 July 2026 ; Revised -; Accepted for Publication 18 August 2026; Published 30 September 2026

Abstract — *The Cultural Heritage Preservation Office (BPK) Region X serves both public services and institutional operations through its public and working spaces. Preliminary observations identified several spatial issues, including the separation of the reception area from the main building, a less interactive exhibition space, limited meeting facilities, and suboptimal supporting facilities and archival storage systems. This community service programme aimed to develop spatial planning recommendations to enhance public services and improve institutional operational effectiveness. The programme employed site surveys and measurements, user needs assessment, spatial planning concept development, design development, participatory consultation, and design finalisation through a collaborative mentoring process involving BPK Region X. The results demonstrate that the application of integration, efficiency, and spatial flexibility principles can improve the quality of both public and working areas. The proposed recommendations include the redesign of the front desk, communal waiting area, exhibition space, workspace, multifunctional meeting room, pantry, and archival storage system. In addition to producing spatial planning recommendations that address institutional operational needs, the programme strengthened collaboration between the university and its community partner through a participatory mentoring approach.*

Keywords — *community service, participatory mentoring, spatial planning, public service, Cultural Heritage Preservation Office*

Abstrak — Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X memiliki fungsi pelayanan publik dan operasional institusi yang didukung oleh area publik dan area kerja. Hasil observasi menunjukkan beberapa permasalahan, antara lain keterpisahan area penerimaan tamu, ruang pameran yang kurang interaktif, keterbatasan ruang rapat, serta belum optimalnya fasilitas pendukung dan sistem penyimpanan arsip. Pengabdian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi penataan ruang untuk mendukung pelayanan publik dan efektivitas operasional institusi. Metode yang digunakan meliputi survei dan pengukuran, identifikasi kebutuhan pengguna, penyusunan konsep, pengembangan desain, konsultasi partisipatif, dan finalisasi desain melalui pendampingan bersama mitra. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan prinsip integrasi, efisiensi, dan fleksibilitas ruang mampu meningkatkan kualitas area publik dan area kerja. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penataan front desk, ruang tunggu komunal, ruang pameran, ruang kerja, ruang rapat multifungsi, pantry, serta modernisasi ruang arsip. Selain menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional institusi, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra melalui proses pendampingan partisipatif.

Kata Kunci—*pengabdian kepada masyarakat, pendampingan partisipatif, penataan ruang, pelayanan publik, Balai Pelestarian Kebudayaan*

I. PENDAHULUAN

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X merupakan institusi yang memiliki peran dalam pelestarian, dokumentasi, pengelolaan informasi, serta diseminasi pengetahuan kebudayaan kepada masyarakat. Selain menjalankan fungsi administratif dan operasional, BPK juga melayani berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti kunjungan edukasi, diskusi, pameran, dan penyebaran informasi terkait warisan budaya. Oleh karena itu, kualitas ruang dan lingkungan fisik bangunan menjadi faktor penting yang dapat mendukung efektivitas pelayanan publik maupun operasional institusi [1].

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak BPK Wilayah X, ditemukan beberapa permasalahan pada area publik dan area kerja. Pada area publik, fungsi penerimaan tamu masih berada pada bangunan yang berbeda dengan bangunan utama sehingga pengunjung sering mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tujuan. Ruang pameran yang digunakan untuk menampilkan koleksi artefak hasil temuan arkeologi masih didominasi oleh sistem display konvensional dengan alur kunjungan yang kurang jelas dan pengalaman ruang yang belum optimal. Selain itu, ruang tunggu dan ruang diskusi yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan aktivitas edukatif maupun penerimaan kelompok pengunjung dalam jumlah yang lebih besar.

Permasalahan juga ditemukan pada area kerja. Ruang kerja masih terbagi dalam beberapa ruang tertutup berdasarkan bidang atau divisi sehingga komunikasi dan koordinasi antarpegawai kurang optimal. Ketersediaan ruang rapat yang terbatas menyebabkan beberapa kegiatan harus memanfaatkan fasilitas pada bangunan lain. Fasilitas pendukung seperti pantry dan ruang arsip juga memerlukan peningkatan kualitas untuk mendukung kenyamanan pengguna dan efisiensi operasional institusi.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana menyusun rekomendasi penataan ruang publik dan kerja yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung efektivitas operasional institusi, serta mengakomodasi kebutuhan pengguna di lingkungan BPK Wilayah X.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi penataan ruang publik dan kerja melalui proses pendampingan partisipatif yang melibatkan pengguna sebagai bagian dari proses identifikasi kebutuhan, evaluasi desain, dan penyempurnaan solusi. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan fasilitas BPK Wilayah X sehingga lebih

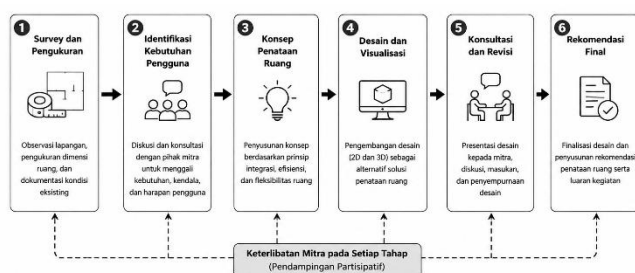
adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik dan operasional institusi.

Pelaku kegiatan pengabdian terdiri atas tim dosen dan mahasiswa Program Studi Sarjana Arsitektur yang berperan dalam survey, pengukuran, analisis kebutuhan, penyusunan konsep, pengembangan desain, serta penyusunan luaran kegiatan. Adapun target pengabdian adalah BPK Wilayah X sebagai mitra kegiatan, khususnya pengelola, staf, dan pengguna ruang yang terlibat dalam aktivitas pelayanan publik maupun operasional sehari-hari.

Berbagai kegiatan pengabdian di bidang penataan ruang umumnya berfokus pada penyusunan desain atau perbaikan fisik ruang tertentu [1-3]. Kebaruan kegiatan ini terletak pada pendekatan pendampingan partisipatif yang dilakukan secara menyeluruh pada area publik dan area kerja dalam satu bangunan institusi kebudayaan. Selain menghasilkan rekomendasi desain, kegiatan ini juga menempatkan pengguna sebagai bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik dan estetika, tetapi juga kebutuhan operasional, pola aktivitas, dan pengembangan institusi pada masa mendatang.

II. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan partisipatif [2 - 7] yang melibatkan pihak Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X sebagai mitra utama. Pendekatan tersebut dipilih untuk memastikan bahwa rekomendasi penataan ruang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi operasional institusi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Arsitektur yang bekerja secara kolaboratif bersama mitra melalui serangkaian tahapan mulai dari survey lapangan, identifikasi kebutuhan pengguna, penyusunan konsep penataan ruang, pengembangan desain, konsultasi, hingga finalisasi rekomendasi (Gambar 1). Lebih lanjut, metode pelaksanaan kegiatan dijelaskan pada subbab berikut.



Gambar 1. Tahapan Pendampingan Partisipatif

A. Desain Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif (*participatory mentoring approach*) dalam penyusunan rekomendasi penataan ruang publik dan kerja pada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek desain dan teknis, tetapi juga kebutuhan operasional, pola aktivitas pengguna, dan kondisi nyata yang dihadapi oleh institusi. Melalui

pendekatan partisipatif, pihak mitra dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi permasalahan, evaluasi alternatif desain, serta penyempurnaan rekomendasi yang dihasilkan.

B. Lokasi dan Sasaran Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X. Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X (sebelumnya BPCB) berlokasi di Jalan Yogyakarta-Solo Km. 15, Bogem, Kalasan, Kabupaten Sleman. Kantor wilayah ini memiliki area kerja yang melayani pelestarian cagar budaya dan nilai tradisi untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Objek pengabdian berupa bangunan dua lantai yang digunakan untuk mendukung fungsi pelayanan publik dan operasional institusi.

Sasaran kegiatan meliputi pengelola, staf, dan pengguna ruang di lingkungan BPK Wilayah X yang terlibat dalam aktivitas pelayanan publik, administrasi, dokumentasi, pengelolaan arsip, serta kegiatan edukasi kebudayaan. Selain itu, pengunjung yang memanfaatkan fasilitas publik juga menjadi bagian dari pengguna yang dipertimbangkan dalam proses penyusunan rekomendasi penataan ruang.

C. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini berupa data kondisi eksisting bangunan, hasil pengukuran ruang, dokumentasi visual, serta hasil diskusi dan konsultasi dengan pihak mitra.

Alat yang digunakan meliputi meteran untuk pengukuran ruang, kamera digital untuk dokumentasi kondisi eksisting, komputer atau laptop untuk pengolahan data dan pengembangan desain, serta perangkat lunak pendukung gambar dan visualisasi tiga dimensi. Selain itu, lembar observasi dan catatan hasil diskusi digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mengevaluasi alternatif desain yang dikembangkan.

D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Tahap awal dilakukan melalui survey lapangan untuk memperoleh data kondisi eksisting bangunan. Kegiatan meliputi observasi ruang, pengukuran dimensi bangunan, dokumentasi visual, serta identifikasi pola penggunaan ruang oleh pengguna. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam penyusunan gambar eksisting dan analisis awal kondisi bangunan.

Selanjutnya, tahap identifikasi kebutuhan dilakukan melalui diskusi dan konsultasi dengan pihak BPK Wilayah X. Kegiatan ini bertujuan menggali kebutuhan ruang, kendala yang dihadapi pengguna, pola aktivitas harian, serta harapan terhadap pengembangan fasilitas pada masa mendatang. Hasil identifikasi kebutuhan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan konsep penataan ruang.

Berdasarkan hasil survey dan identifikasi kebutuhan pengguna, dilakukan penyusunan konsep penataan ruang yang mengacu pada prinsip integrasi, efisiensi, dan fleksibilitas ruang. Konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan alternatif desain pada area publik maupun area kerja.

Setelah itu, tahapan berikutnya meliputi penyusunan gambar dua dimensi dan visualisasi tiga dimensi sebagai

media komunikasi desain. Hasil desain kemudian dipresentasikan kepada pihak mitra untuk memperoleh masukan dan evaluasi. Proses konsultasi dilakukan secara bertahap sehingga setiap masukan dapat diakomodasi dalam penyempurnaan desain.

Sedangkan tahap akhir meliputi penyempurnaan desain berdasarkan hasil konsultasi, penyusunan dokumen desain, serta penyusunan luaran kegiatan berupa laporan pengabdian dan artikel ilmiah. Pada tahap ini juga dilakukan penyampaian rekomendasi kepada mitra sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan fasilitas pada masa mendatang.

E. Parameter Pengabdian dan Analisis Data

Parameter yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi aspek orientasi pengunjung, kenyamanan ruang, fleksibilitas penggunaan ruang, efektivitas komunikasi antar pengguna, efisiensi pemanfaatan ruang, serta kualitas fasilitas pendukung. Parameter tersebut digunakan untuk mengevaluasi kondisi eksisting dan mengembangkan rekomendasi penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, pengukuran, dokumentasi, dan konsultasi dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting, kebutuhan pengguna, dan potensi pengembangan ruang sehingga diperoleh rekomendasi penataan ruang yang mendukung pelayanan publik dan operasional institusi secara lebih efektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan rekomendasi penataan ruang publik dan kerja pada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X yang disusun melalui pendekatan pendampingan partisipatif. Proses pendampingan diawali dengan identifikasi kondisi eksisting bangunan dan kebutuhan pengguna sebagai dasar dalam penyusunan konsep penataan ruang. Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi rekomendasi desain yang mencakup penataan area publik dan area kerja, serta disempurnakan melalui konsultasi dan evaluasi bersama pihak mitra. Selain menghasilkan rekomendasi desain, kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dalam setiap tahapan pelaksanaan sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian disajikan pada subbab berikut.

3.1 Kondisi Eksisting Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X

Evaluasi kondisi eksisting merupakan tahapan awal yang penting dalam proses penyusunan rekomendasi penataan ruang karena memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara fungsi ruang dan kebutuhan pengguna [8].

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X menempati bangunan dua lantai yang digunakan untuk mendukung fungsi pelayanan publik dan operasional institusi. Lantai dasar dimanfaatkan untuk aktivitas yang

berhubungan dengan pengunjung, sedangkan lantai atas digunakan sebagai area kerja dan pengelolaan administrasi. Hasil survey dan observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa ruang pada kedua lantai tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi kualitas pelayanan maupun efektivitas aktivitas kerja.

3.1.1. Area Publik

Area publik BPK Wilayah X terdiri atas area penerimaan tamu (*front desk*), ruang tunggu, ruang diskusi, ruang pameran artefak, dan fasilitas pendukung bagi pengunjung. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa ruang tersebut belum mampu mendukung fungsi pelayanan publik secara optimal.

Permasalahan utama ditemukan pada posisi *front desk* yang masih berada di bangunan terpisah sehingga orientasi pengunjung menuju bangunan utama menjadi kurang efektif. Ruang tunggu juga masih bersifat pasif dan belum mampu mengakomodasi aktivitas edukasi maupun penerimaan rombongan pengunjung. Selain itu, ruang diskusi masih menggunakan tata ruang konvensional yang kurang fleksibel untuk mendukung berbagai bentuk kegiatan.

Pada ruang pameran, sistem display masih didominasi lemari dan rak konvensional dengan alur kunjungan yang belum terstruktur, sehingga pengalaman ruang dan penyampaian informasi budaya belum optimal. Di sisi lain, salah satu toilet di lantai dasar telah berubah fungsi menjadi ruang penyimpanan (Gambar 2), yang mengurangi kualitas fasilitas pendukung bagi pengunjung.

Secara umum, hasil observasi menunjukkan bahwa area publik memerlukan peningkatan dari aspek orientasi pengunjung, kualitas pengalaman ruang, serta fleksibilitas penggunaan ruang agar mampu mendukung fungsi pelayanan dan edukasi secara lebih efektif.



Gambar 2. Toilet yang Sudah Berfungsi Menjadi Gudang

3.1.2. Area Kerja

Area kerja pada lantai dua digunakan untuk mendukung aktivitas administrasi, koordinasi, dokumentasi, dan pengelolaan arsip. Berdasarkan hasil observasi, pembagian ruang kerja berdasarkan bidang masih menggunakan sekat masif sehingga komunikasi dan koordinasi antarpegawai kurang optimal.

Selain itu, belum tersedia ruang rapat yang memadai sehingga berbagai kegiatan koordinasi masih memanfaatkan bangunan lain. Pantry yang ada juga memiliki ukuran terbatas dan berada pada jalur menuju kamar mandi sehingga kurang nyaman digunakan sebagai ruang interaksi informal (Gambar 3). Pada ruang arsip, sistem penyimpanan masih menggunakan rak konvensional yang dinilai belum efisien dalam mengakomodasi penambahan koleksi arsip (Gambar 4).

Hasil diskusi bersama mitra juga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap ruang yang lebih fleksibel untuk mendukung berbagai aktivitas operasional, termasuk aktivitas yang bersifat insidental. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan konsep penataan area kerja pada tahap berikutnya.



Gambar 3. Pantry Eksisting yang Menyatu dengan Kamar Mandi



Gambar 4. Ruang Arsip Eksisting

3.1.3. Permasalahan Utama Penataan Ruang

Berdasarkan hasil survey, observasi, dan diskusi dengan pihak BPK Wilayah X, permasalahan utama yang ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu integrasi ruang, efisiensi ruang, dan fleksibilitas ruang.

Permasalahan integrasi ruang terlihat pada keterpisahan fungsi pelayanan publik, hubungan antar ruang yang belum optimal, serta kurang jelasnya alur pergerakan pengguna pada area publik. Permasalahan efisiensi ruang terlihat pada pemanfaatan beberapa ruang yang belum optimal, termasuk penggunaan ruang penyimpanan dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, kebutuhan terhadap fleksibilitas ruang muncul sebagai konsekuensi dari berkembangnya aktivitas institusi yang memerlukan ruang yang mampu

mengakomodasi berbagai fungsi secara adaptif. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan konsep penataan ruang yang dikembangkan pada tahap berikutnya.

3.2 Konsep Penataan Ruang

Konsep penataan ruang pada BPK Wilayah X disusun berdasarkan hasil observasi lapangan, identifikasi kebutuhan pengguna, serta proses diskusi dan konsultasi yang dilakukan bersama pihak mitra. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik ruang, tetapi juga hubungan antar fungsi ruang, pola aktivitas pengguna, serta kebutuhan pengembangan institusi di masa mendatang. Oleh karena itu, konsep penataan ruang dirumuskan dengan mengacu pada tiga prinsip utama, yaitu integrasi, efisiensi, dan fleksibilitas ruang.

Prinsip integrasi diterapkan untuk memperkuat keterhubungan antar fungsi ruang sehingga aktivitas yang saling berkaitan dapat berlangsung secara lebih efektif serta mendukung koordinasi antar pengguna dalam institusi publik [9]. Pada area publik, integrasi dilakukan melalui penyusunan alur kunjungan yang lebih jelas antara area penerimaan, ruang komunal, ruang diskusi, dan ruang pameran. Sementara itu, pada area kerja, integrasi diwujudkan melalui penguatan hubungan antar ruang kerja dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pengguna.

Prinsip efisiensi ruang diterapkan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang telah tersedia tanpa memerlukan penambahan luas bangunan secara signifikan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan ruang yang mampu mendukung lebih dari satu aktivitas serta meninjau kembali fungsi ruang yang belum dimanfaatkan secara optimal, sejalan dengan pendekatan adaptasi bangunan yang menekankan reorganisasi fungsi ruang dan intensifikasi pemanfaatan aset eksisting sebelum melakukan ekspansi fisik [10, 11]. Dengan strategi tersebut, kebutuhan ruang baru dapat diakomodasi melalui pengaturan ulang ruang eksisting yang lebih efektif.

Selain integrasi dan efisiensi, hasil konsultasi dengan mitra menunjukkan perlunya fleksibilitas ruang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan yang dapat berubah sesuai kondisi operasional. Oleh karena itu, beberapa ruang dirancang dengan pendekatan multifungsi dan didukung oleh penggunaan furnitur yang mudah dipindahkan maupun disusun ulang. Pendekatan ini memungkinkan ruang digunakan untuk berbagai aktivitas tanpa memerlukan perubahan fisik yang besar.

Konsep fleksibilitas ruang menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan desain karena memungkinkan ruang beradaptasi terhadap kebutuhan pengguna yang beragam dan mendukung berbagai jenis kegiatan dalam institusi kebudayaan [12, 13]. Salah satu contoh penerapannya adalah pengembangan ruang rapat yang dapat berfungsi sebagai ruang multifungsi dengan dukungan furnitur portabel. Pendekatan tersebut memungkinkan ruang digunakan untuk kegiatan rapat, diskusi, presentasi, maupun aktivitas lain yang muncul dalam operasional sehari-hari.

Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam penyusunan desain pada area publik dan area kerja. Melalui pendekatan

integrasi, efisiensi, dan fleksibilitas ruang, penataan yang diusulkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung efektivitas operasional institusi, serta memberikan ruang yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

3.3 Penataan Area Publik

Area publik merupakan bagian bangunan yang berhubungan langsung dengan pengunjung dan menjadi titik awal interaksi antara masyarakat dengan BPK Wilayah X. Oleh karena itu, kualitas penataan area publik memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman pengunjung, mendukung penyampaian informasi budaya, serta memperkuat fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh institusi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa ruang pada area publik masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek orientasi pengguna, kenyamanan ruang, maupun fleksibilitas pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan konsultasi dengan mitra, penataan area publik difokuskan pada pengembangan *front desk*, ruang tunggu dan area komunal, ruang diskusi, serta ruang pameran artefak. Keempat ruang tersebut dirancang sebagai satu kesatuan yang saling terhubung untuk menciptakan pengalaman kunjungan yang lebih terstruktur dan nyaman (Gambar 5).



Gambar 5. Penataan Area Publik (Lantai 1)

3.3.1. Resepsionis/Front Desk

Penataan front desk diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan area penerimaan tamu yang lebih mudah dikenali dan diakses oleh pengunjung. Berdasarkan hasil diskusi bersama pihak BPK Wilayah X, keberadaan front desk yang terintegrasi dengan bangunan utama merupakan salah satu kebutuhan utama untuk memperjelas orientasi pengunjung sejak pertama kali memasuki kawasan.

Sebagai tindak lanjut, *front desk* ditempatkan pada area depan bangunan utama sehingga berfungsi sebagai titik informasi dan penerimaan tamu yang menghubungkan berbagai fungsi ruang pada area publik (Gambar 6). Penataan ini juga menciptakan hubungan ruang yang lebih baik dengan ruang tunggu, ruang diskusi, dan ruang pameran sehingga alur pelayanan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengunjung.

Keberadaan front desk pada posisi yang lebih strategis diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan,

mempermudah orientasi pengunjung, serta mendukung pengalaman kunjungan yang lebih nyaman dan efisien.



Gambar 6. Desain *Front Desk* dan Arah Pengambilan Sudut Gambar dari Denah

3.3.2. Ruang Tunggu dan Area Komunal

Penataan ruang tunggu diarahkan untuk mengembangkan fungsinya tidak hanya sebagai area menunggu, tetapi juga sebagai ruang komunal yang mampu mendukung berbagai aktivitas pelayanan dan edukasi. Berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak BPK Wilayah X, ruang ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjung individu maupun rombongan, termasuk kegiatan diskusi dan kunjungan edukatif (Gambar 7).



Gambar 7. Desain Ruang Tunggu dan Arah Pengambilan Sudut Gambar dari Denah

Konsep penataan mengintegrasikan ruang tunggu dengan area publik melalui penyediaan berbagai jenis tempat duduk yang fleksibel dan pengaturan ruang yang lebih terbuka. Selain meningkatkan kenyamanan pengunjung, ruang komunal juga berfungsi sebagai area interaksi informal yang mendukung penyampaian informasi budaya serta menghubungkan front desk, ruang diskusi, dan ruang pameran.

Pengembangan ruang tunggu menjadi area komunal multifungsi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk berbagai aktivitas tanpa memerlukan penambahan ruang baru.

3.3.3. Ruang Diskusi

Penataan ruang diskusi diarahkan untuk mendukung berbagai aktivitas komunikasi, edukasi, dan interaksi antara BPK Wilayah X dengan pengunjung maupun pihak eksternal. Berdasarkan kebutuhan pengguna, ruang ini dirancang lebih fleksibel sehingga dapat mengakomodasi kegiatan presentasi, diskusi kelompok, maupun penyampaian informasi dalam suasana yang lebih terbuka (Gambar 8) dibandingkan ruang rapat konvensional (Gambar 9).



Gambar 8. Rancangan ruang diskusi komunal



Gambar 9. Ruang Diskusi Lama/Eksisting

Konsep penataan mengintegrasikan ruang diskusi dengan area komunal melalui penggunaan tata ruang yang adaptif serta perangkat presentasi yang mudah disesuaikan dengan berbagai kebutuhan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan ruang dimanfaatkan secara lebih optimal tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai media komunikasi dan edukasi.

Dengan konsep tersebut, ruang diskusi diharapkan mampu meningkatkan kualitas interaksi, mendukung kegiatan edukasi budaya, serta memberikan fleksibilitas penggunaan sesuai perkembangan kebutuhan operasional BPK Wilayah X.

3.3.4. Ruang Pamer Artefak

Penataan ruang pamer diarahkan untuk memperkuat fungsi BPK Wilayah X sebagai institusi pelestarian sekaligus media edukasi budaya. Konsep yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada penyajian koleksi artefak, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengalaman pengunjung (*visitor experience*) [14] serta efektivitas penyampaian informasi budaya [15].

Rekomendasi penataan meliputi penyusunan alur kunjungan yang lebih terarah, pengembangan sistem *display* yang memperhatikan keterbacaan informasi dan hubungan antarkoleksi, serta peningkatan kualitas visual ruang agar tercipta suasana yang lebih nyaman dan menarik (Gambar 10). Selain itu, pemanfaatan media interpretasi dan teknologi interaktif diusulkan untuk mendukung proses

pembelajaran bagi berbagai kelompok pengunjung, termasuk pelajar dan masyarakat umum.



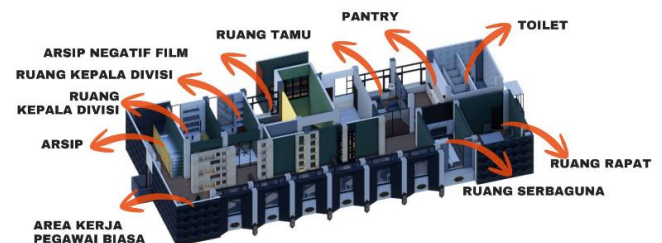
Gambar 10. Ruang Display Artefak

Melalui penataan tersebut, ruang pamer diharapkan mampu menghadirkan pengalaman kunjungan yang lebih informatif, interaktif, dan berkesan, sehingga fungsi pelestarian, interpretasi, dan diseminasi pengetahuan budaya dapat berjalan secara lebih optimal.

3.4 Penataan Area Kerja

Selain berfungsi sebagai ruang pelayanan publik, BPK Wilayah X juga memerlukan lingkungan kerja yang mampu mendukung aktivitas administrasi, koordinasi, pengelolaan informasi, dan pelestarian data kebudayaan. Oleh karena itu, penataan area kerja tidak hanya berorientasi pada aspek fisik ruang, tetapi juga pada peningkatan efektivitas operasional, kenyamanan pengguna, dan kualitas interaksi antarpegawai.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan mitra, beberapa ruang pada area kerja masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi produktivitas dan kenyamanan pengguna. Penataan area kerja difokuskan pada pengembangan ruang kerja, ruang rapat, pantry, dan ruang arsip sebagai elemen utama yang mendukung operasional institusi (Gambar 11).



Gambar 11. Penataan Area Kerja (Lantai 2)

3.4.1. Ruang Kerja Staf/Pegawai

Ruang kerja merupakan area utama yang digunakan untuk mendukung aktivitas administrasi dan koordinasi di lingkungan BPK Wilayah X. Pada kondisi eksisting, ruang kerja masih dibagi ke dalam beberapa ruang terpisah berdasarkan bidang atau divisi yang ada. Pembagian tersebut menggunakan dinding masif dan pintu pada setiap ruang sehingga interaksi antarpegawai menjadi relatif terbatas.

Selain menimbulkan kesan ruang yang lebih sempit, konfigurasi tersebut menyebabkan proses koordinasi antarbidang memerlukan perpindahan ruang yang lebih sering. Kondisi ini dinilai kurang mendukung kebutuhan komunikasi dan kolaborasi yang semakin berkembang dalam operasional institusi.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, konsep penataan yang diusulkan mengarah pada pengembangan ruang kerja yang lebih terbuka melalui pendekatan *open office* (Gambar 12). Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan seluruh kebutuhan privasi pengguna, tetapi untuk meningkatkan keterhubungan visual dan kemudahan komunikasi antarpegawai.

Pada beberapa area yang memerlukan tingkat privasi tertentu, penggunaan partisi non permanen atau material transparan dapat menjadi alternatif yang tetap menjaga hubungan visual antar ruang. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan kolaborasi dan privasi dapat tetap terjaga.

Dari perspektif integrasi ruang, konsep ruang kerja terbuka memungkinkan komunikasi dan koordinasi berlangsung secara lebih efektif. Sementara itu, dari perspektif efisiensi ruang, pengurangan penggunaan sekat masif memungkinkan ruang dimanfaatkan secara lebih optimal serta menciptakan kesan ruang yang lebih luas dan fleksibel.



Gambar 12. Konsep *open office* pada ruang kerja staf

Melalui pendekatan tersebut, ruang kerja diharapkan mampu mendukung produktivitas pengguna sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan institusi pada masa mendatang.

3.4.2. Ruang Rapat

Penataan ruang rapat diarahkan untuk mendukung kegiatan koordinasi, diskusi, presentasi, serta pertemuan dengan mitra eksternal yang selama ini belum dapat diakomodasi secara optimal di dalam bangunan utama. Penyediaan ruang rapat menjadi salah satu kebutuhan prioritas untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan operasional institusi (Gambar 13).

Ruang rapat dirancang sebagai ruang multifungsi yang dilengkapi dengan fasilitas presentasi dan furnitur portabel sehingga konfigurasi ruang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan ruang dimanfaatkan tidak hanya untuk rapat formal, tetapi juga untuk kegiatan edukasi, diskusi kelompok, maupun aktivitas insidental sesuai kebutuhan pengguna. Penempatan ruang pada lokasi yang mudah diakses juga mendukung pelaksanaan kegiatan bersama mitra tanpa mengganggu aktivitas kerja sehari-hari.

Melalui konsep tersebut, ruang rapat diharapkan mampu meningkatkan kualitas koordinasi internal maupun

eksternal, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang melalui penerapan konsep ruang multifungsi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan institusi.



Gambar 13. Ruang rapat eksternal

3.4.3. Pantry

Penataan pantry diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus menyediakan ruang interaksi informal bagi pegawai BPK Wilayah X. Selain berfungsi sebagai area penyajian makanan dan minuman, pantry dirancang sebagai ruang pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk beristirahat dan membangun komunikasi antarpengguna (Gambar 14).

Konsep penataan dilakukan melalui penyediaan area duduk yang lebih nyaman, pengaturan furnitur yang lebih efisien, serta penempatan pantry yang tidak mengganggu sirkulasi menuju ruang lain. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman sekaligus mendukung interaksi informal antarpegawai dari berbagai bidang.

Dengan penataan tersebut, pantry tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan kerja yang mendorong kenyamanan, kolaborasi, dan kualitas pengalaman pengguna.



Gambar 14. Pantry

3.4.3. Arsip

Penataan ruang arsip diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan sekaligus mendukung pengelolaan informasi kebudayaan di BPK Wilayah X. Mengingat koleksi yang dikelola mencakup dokumen, film, dan klise foto, sistem penyimpanan dirancang agar mampu mengakomodasi penambahan arsip serta mempermudah proses temu kembali informasi.

Konsep penataan mengusulkan penggunaan rak geser mekanis (*mobile shelving system*) untuk mengoptimalkan kapasitas penyimpanan tanpa memerlukan penambahan luas ruang. Selain itu, pengembangan sistem katalog digital direkomendasikan guna mempercepat proses identifikasi dan pengelolaan koleksi arsip secara lebih sistematis.

Melalui penataan tersebut, ruang arsip diharapkan mampu mendukung pengelolaan informasi kebudayaan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fungsi BPK Wilayah X dalam pelestarian, dokumentasi, dan diseminasi warisan budaya.

3.5 Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian di BPK Wilayah X juga menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa melalui keterlibatan langsung pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari survey lapangan, identifikasi kebutuhan pengguna, pengembangan desain, hingga penyusunan luaran pengabdian. Keterlibatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan pada kasus nyata di lingkungan profesional.

Selama proses pendampingan, mahasiswa berpartisipasi dalam pengukuran dan dokumentasi kondisi eksisting, penyusunan gambar dua dimensi, pemodelan tiga dimensi, visualisasi desain, serta presentasi dan konsultasi bersama mitra. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis di bidang perancangan, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama tim, dan kemampuan merespons masukan pengguna dalam proses penyempurnaan desain.

Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa memperoleh pembelajaran berbasis praktik (*experiential learning*) yang mengintegrasikan aspek akademik, teknis, dan profesional. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan rekomendasi penataan ruang bagi BPK Wilayah X, tetapi juga memperkuat kompetensi mahasiswa dalam menghadapi permasalahan nyata di bidang arsitektur dan pelayanan publik.

3.6 Pendampingan dan Penyempurnaan Desain Bersama Mitra

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada penyusunan desain, tetapi juga menempatkan proses pendampingan sebagai bagian penting dalam menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pengembangan desain dilakukan secara partisipatif melalui diskusi, konsultasi, dan presentasi berkala kepada pihak BPK Wilayah X. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara tim pengabdian dan mitra sehingga berbagai keputusan desain dapat disusun berdasarkan kondisi nyata dan kebutuhan operasional institusi.

Setelah proses survey dan identifikasi kebutuhan selesai dilakukan, tim pengabdian menyusun konsep awal penataan ruang yang kemudian dipresentasikan kepada pihak BPK Wilayah X. Presentasi pertama bertujuan memperoleh masukan awal terkait kebutuhan ruang, pola aktivitas pengguna, serta berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam operasional bangunan. Pada tahap ini, pihak mitra memberikan tanggapan positif terhadap gagasan

pengintegrasian area pelayanan publik melalui penempatan front desk pada bangunan utama. Menurut mitra, keberadaan front desk pada lokasi yang mudah terlihat akan membantu pengunjung memperoleh orientasi yang lebih jelas sejak pertama kali memasuki bangunan.

Selain itu, usulan pengembangan ruang rapat memperoleh perhatian khusus dari pihak pengguna. Pada kondisi eksisting, kegiatan rapat maupun presentasi sering memanfaatkan fasilitas pada bangunan lain sehingga dinilai kurang efisien. Oleh karena itu, penyediaan ruang rapat internal dan eksternal dianggap sebagai kebutuhan yang penting untuk mendukung kegiatan koordinasi maupun pertemuan dengan pihak luar. Usulan pengembangan pantry yang lebih representatif juga memperoleh respons positif karena dinilai dapat meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus mendukung interaksi informal antarpegawai.

Pada tahap konsultasi berikutnya, diskusi berkembang pada kebutuhan ruang yang bersifat fleksibel. Salah satu isu yang muncul adalah kebutuhan ruang untuk mendukung aktivitas tertentu yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh ruang-ruang yang tersedia. Dalam diskusi tersebut, beberapa staf menyampaikan bahwa aktivitas ibadah sering dilakukan di ruang arsip karena lokasi musholla berada di luar bangunan utama. Meskipun pihak pengelola tidak menghendaki penyediaan ruang musholla khusus di dalam bangunan karena fasilitas tersebut telah tersedia pada kawasan yang sama, kebutuhan pengguna terhadap ruang yang lebih fleksibel tetap menjadi perhatian dalam proses pengembangan desain.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, tim pengabdian mengusulkan konsep ruang rapat multifungsi yang didukung oleh penggunaan furnitur portabel dan mudah dipindahkan. Meja dan kursi dirancang agar dapat dilipat, disusun ulang, maupun disimpan secara ringkas sehingga ruang dapat beradaptasi terhadap berbagai kebutuhan yang muncul dalam aktivitas sehari-hari. Pendekatan ini dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna tanpa menambah ruang baru maupun mengubah kebijakan pengelolaan fasilitas yang telah ada.

Masukan lain yang memperoleh apresiasi dari pihak mitra adalah pengaktifan kembali toilet pada lantai dasar yang sebelumnya berubah fungsi menjadi ruang penyimpanan. Menurut pengguna, keberadaan toilet pada area publik sangat penting untuk mendukung kenyamanan pengunjung, terutama ketika terdapat kegiatan edukasi, kunjungan kelompok, maupun kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengembalian fungsi toilet menjadi bagian dari rekomendasi penataan yang disepakati bersama.

Proses konsultasi juga menghasilkan berbagai penyempurnaan pada area kerja dan ruang arsip. Pengguna menyampaikan kebutuhan akan sistem penyimpanan yang lebih efisien mengingat jumlah arsip yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Masukan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui usulan penggunaan sistem rak geser mekanis dan dukungan katalog digital untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan sekaligus mempermudah proses pencarian arsip.

Secara umum, hasil konsultasi dan penyempurnaan desain bersama mitra dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa berbagai rekomendasi yang dihasilkan merupakan respon langsung terhadap kebutuhan dan masukan yang disampaikan oleh pengguna selama proses pendampingan berlangsung.

Tabel 1. Hasil Konsultasi dan Penyempurnaan Desain Bersama Mitra

No	Masukan dan Kebutuhan Mitra	Tindak Lanjut dalam Desain
1	Front desk terpisah dari gedung utama	Front desk dipindahkan ke bangunan utama
2	Ruang tunggu terbatas	Ruang komunal multifungsi
3	Belum ada ruang rapat	Ruang rapat internal dan eksternal
4	Kebutuhan ruang fleksibel	Furnitur portabel dan ruang multifungsi
5	Pantry kurang nyaman	Pantry baru dengan area duduk
6	Toilet lantai 1 jadi gudang	Pengaktifan kembali toilet di lantai 1
7	Arsip konvensional	Rak geser mekanis dan katalog digital

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan desain memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas solusi yang dihasilkan. Berbagai rekomendasi yang disusun tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis dan estetika, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan operasional, kebiasaan pengguna, serta potensi pengembangan institusi pada masa mendatang. Dengan demikian, proses pendampingan tidak hanya menghasilkan rekomendasi desain, tetapi juga membangun kesepahaman antara perguruan tinggi dan mitra dalam merumuskan strategi pengembangan ruang yang lebih sesuai dengan kebutuhan BPK Wilayah X.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X berhasil menghasilkan rekomendasi penataan ruang publik dan kerja melalui pendekatan pendampingan partisipatif yang melibatkan mitra dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan proses identifikasi kebutuhan, pengembangan konsep, hingga penyempurnaan desain dilakukan berdasarkan kondisi eksisting, kebutuhan operasional, dan masukan langsung dari pengguna.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan prinsip integrasi, efisiensi, dan fleksibilitas ruang mampu menjawab berbagai kebutuhan penataan pada area publik maupun area kerja. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penataan front desk, ruang tunggu komunal, ruang diskusi, ruang pameran, ruang kerja, ruang rapat multifungsi, pantry, serta modernisasi ruang arsip guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas operasional institusi.

Proses pendampingan partisipatif tidak hanya menghasilkan rekomendasi desain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra. Keterlibatan mahasiswa selama kegiatan turut memberikan pengalaman pembelajaran berbasis praktik (experiential learning) yang menghubungkan kompetensi akademik dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, pendekatan pendampingan partisipatif dapat menjadi model yang efektif dalam penyusunan rekomendasi penataan ruang pada institusi pelayanan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X atas kerja sama, dukungan, serta partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh staf dan pengelola BPK Wilayah X yang telah memberikan informasi, masukan, dan kesempatan kepada tim untuk melakukan proses pendampingan dan pengembangan rekomendasi penataan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. A. Linda and A. Mayansara, "Hubungan antara Pengelolaan Aset Fisik dan Tata Ruang yang Efektif terhadap Kinerja Operasional Rumah Sakit," *J Tek Sains Mod*, vol. 2, no. 5, pp. 220–227, Oct. 2025, doi: 10.69930/jtsm.v2i5.521.
- [2] M. R. Alhamdani, M. Nurhamsyah, and S. Muazir, "Perencanaan dan Perancangan Gedung Aula dan Ruang Kelas Sekolah Diniyah Pondok Pesantren Rubath Naqsyabandiyah Kubu Raya," *Jurnal Panrita Abdi*, vol. 8, no. 3, Jul. 2024.
- [3] F. B. Ola, "Desain Tata Bunyi Ruang Ibadah Gereja Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat," *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 14, no. 2, 2023.
- [4] D. P. N. Huda, M. R. Maharani, A. D. Susanti, B. P. Wahyono, and T. R. Nuzuluddin, "Penataan Interior Ruang Kerja pada Bangunan Kantor Kelurahan Pakintelan Semarang," *Jurnal Pengabdian Lingkungan Binaan Indonesia (JPLBI)*, vol. 1, no. 1, 2025.
- [5] F. Amalia, S. L. Komariah, R. Drastiani, and A. Ulfa, "Pendampingan Perencanaan dan Perancangan Kantor dan Fasilitas Desa Muara Penimbang Ogan Ilir," *Abdimas Galuh*, vol. 8, no. 1, 2026.
- [6] M. Kinanthi *et al.*, "Pendampingan Perencanaan Master Plan Kompleks GKJ Medari menggunakan Media Maket Berbasis Partisipatif," *Jurnal Atma Inovasia (JAI)*, vol. 5, no. 3, 2025.
- [7] M. Hrivnák, P. Moritz, K. Melichová, O. Roháčiková, and L. Pospišová, "Designing the Participation on Local Development Planning: From Literature Review to Adaptive Framework for Practice," *Societies*, vol. 11, no. 1, p. 19, Mar. 2021, doi: 10.3390/soc11010019.
- [8] F. K. Haris and N. R. Syamsiyah, "EVALUASI EFISIENSI RUANG DAN POLA SIKULASI KANTOR DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOYOLALI," in *2026: Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur*, Surakarta: Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jan. 2026.
- [9] E. Duivenvoorden and T. Hartmann, "Challenges of an integrated management of public space: Exploring an integrated policy arrangement of managing public space in Dutch municipalities," *European Planning Studies*, vol. 33, no. 9, pp. 1535–1553, Sep. 2025, doi: 10.1080/09654313.2025.2504705.
- [10] J. Douglas, *Building adaptation*, 2nd ed. Amsterdam Boston London: Butterworth-Heinemann, 2006.
- [11] X. Wang and S. Ramakrishnan, *Environmental sustainability in building design and construction*. Springer, 2021.
- [12] T. Ambrose and C. Paine, *Museum Basics: The International Handbook*, 5th ed. London: Routledge, 2025. doi: 10.4324/9781003466598.

- [13] G. Black, *Museums and the challenge of change: Old institutions in a new world*. Routledge, 2021.
- [14] V. Dewi Lestari, A. Amirullah, and M. W. Rante, "Peran Interpretasi Non-Personal Terhadap Kualitas Pengalaman Wisata Edukasi di Museum Karaeng Pattingalloang," *ITINERARY: Journal of Travel Operation and Travel Business*, vol. 1, no. 12, pp. 76–82, 2025.
- [15] A. N. S. Suryahana and D. Lisa, "Analisis Pengaruh Sirkulasi dan Tata Ruang terhadap Pengalaman Pengunjung di Museum Lampung," *Jurnal TekstuReka*, vol. 3, no. 2, Sep. 2025.

PENULIS



Andi Prasetyo Wibowo, Dosen Departemen
Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta



Albert Galen Fabian, Prodi S1 Arsitektur,
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta



Vincentia Reni Vitasurya, Dosen
Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta